

STRATEGIC MANAGEMENT OF RURAL ROAD MAINTENANCE IN NORTH BARITO REGENCY

Subiyantoro¹ dan Yuslan Irianie²

¹Dinas Pekerjaan Umum Barito Utara

²Faculty of Engineering, Lambung Mangkurat University

ABSTRACT

Road maintenance management in the rural area by the government of North Barito Regency has not gone well. Many rural roads are not maintained because of a limited budget and the government agencies and the private sector on the maintenance of rural roads are not well coordinated, therefore the need for structured management strategies is in demand. This study aims to create a plan of management strategies, and determine the priority of rural road maintenance in North Barito Regency.

The analysis of the research was carried out by the analysis of rural road infrastructure using the analysis of assessment criteria and SWOT analysis, analysis of management sequence of the rural road using the Most Desirable analysis by society (MDm), and analysis of the rural roads maintenance costs.

The results of the inventory data shows that there are 154 rural roads recorded in the village. Based on the analysis of the assessment criteria, there are 130 roads and the SWOT analysis shows 115 roads, therefore, the rural roads that are categorized in the analysis of rural road infrastructure to be maintained are 115 rural roads. The sequence analysis management using MDm analysis is used to determine the priority order of 115 village road maintenance road. The cost analysis determination is based on government funding sources Barito Utara as much as Rp 1.110.000.000, while the budget plan that is allocated for the maintenance for the 115 village roads is Rp 3.532.482.275, it is therefore necessary to create a strategy. The preparation of the strategy is divided into a long-term strategic plan for five years, and short-term strategic plans for one year. In the first year, there are 36 packages with the allocation of Rp 1.110.000.000, for the second year there are 35 packages with funds allocated as much as Rp 1.137.200.000, for the third year there are 39 packages with funds allocated Rp 1.165.650.000, while there is one work package of 5 packages with funds allocated Rp.168.199.850.

All packages of rural road maintenance work can be done with the assumption that each year has been allocated to the budget plan and the planned work program can be completed in 4 years. It is suggested to make some sort of mapping of the location of the inventory, assessment criteria approach in more detailed and accurate to get the actual results.

Keywords: strategic planning, assessment criteria, SWOT, MDm, costs.

1. PENDAHULUAN

Jalan desa merupakan salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah desa dari sumber-sumber informasi, penghubung kepusat-pusat produksi dan tempat-tempat distribusi/pemasaran. Selain itu, jalan desa memudahkan dalam jarak capai jangkauan penduduk kepusat-pusat pelayanan social budaya seperti sarana pendidikan (sekolah), kesehatan (puskesmas, posyandu), dan ibadah. Jalan desa dianggap menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang dapat

mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa dari kemiskinan dan kebodohan.

Manajemen pemeliharaan jalan desa merupakan suatu cara atau langkah-langkah bagaimana pemeliharaan akan dapat dilaksanakan secara tepat dengan maksud menjaga kelangsungan pemeliharaan jalan terhadap investasi bangunan infrastrukstur sebagai suatu aset yang berharga. Dalam rangka pemerataan pemeliharaan jalan desa maka diberikan ruang mekanisme pemerataan bagi daerah. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk pembinaan jalan desa dapat menyebabkan kurang maksimalnya

Correspondence : Subiyantoro

pemeliharaan jalan desa. Maka perlu dilakukannya prioritas pemeliharaan ruas jalan desa dengan menyesuaikan dana yang disediakan

Setelah menemukan mana-mana jalan desa yang telah diidentifikasi prioritas penanganannya, maka pemerintah daerah perlu menyusun strategi jangka menengah dan jangka pendek dalam pengelolaannya. Sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan baik. Tidak ada lagi tumpang tindih dalam penanganan pengelolaan dan pemeliharaan jalan desa tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Rencana strategi pengelolaan pemeliharaan jalan desa yang dilakukan melalui beberapa tahapan analisis untuk menentukan urutan prioritas penanganannya. Penentuan urutan prioritas perlu adanya evaluasi yang merupakan penilaian untuk menjadi valid hasil dari analisis penilaian prasarana, analisis tingkat pengelolaan dan analisis skala prioritas.

Data yang dikumpulkan dari hasil survei inventaris jalan desa yang terdata 154 ruas jalan desa dengan panjang jalan 130,01 kilometer dengan rincian 6,25 kilometer permukaan aspal, 29,79 kilometer permukaan beton, 21,94 kilometer permukaan kerikil/maka dan sedangkan sisanya 71,59 kilometer permukaan masih berupa tanah. Pengelolaan pemeliharaan jalan desa dilakukan dengan menggunakan beberapa analisis sehingga mendapatkan rencana strategi.

3. HASIL DAN PEMBAHAS

Analisis awal dapat dilakukan setelah mendapat data inventaris jalan kemudian menilai prasarana jalan desa yang berdasarkan kriteria penilaian aspek kelayakan teknis, aspek ekonomi dan aspek sosial. Hasil nilai survei kriteria penilaian yang dilakukan oleh tim kemudian diubah ke nilai persen dengan petunjuk dari buku

pedoman petunjuk teknis jalan desa. Hasil nilai analisis kriteria penilaian dapat dilihat pada Tabel 1 yang menjelaskan ruas jalan desa yang masuk tahap awal pemeliharaan jalan desa.

No	Nilai (%)	Ruas Jalan
1	83	1
2	82	2
3	80	2
4	78	2
5	77	9
6	75	12
7	73	25
8	72	26
9	70	19
10	68	17
11	67	12
12	65	12
13	63	11
14	62	2
15	60	6
16	58	5

Tabel 1. Hasil Nilai Kriteria Penilaian

Berdasarkan buku pedoman petunjuk teknis jalan desa yaitu hasil analisis yang masuk kriteria penilaian harus diatas atau sama dengan 65 persen. Sehingga ruas jalan desa yang ada di Kabupaten Barito Utara sebanyak 150 ruas jalan yang ada, sekitar 130 ruas jalan yang masuk kriteria penilaian sedangkan 24 ruas jalan tidak masuk kriteria penilaian jalan desa.

Selanjutnya hasil dari kriteria penilaian aspek kelayakan teknis, aspek ekonomi dan aspek sosial dilakukan analisis SWOT. Kegunaan analisis SWOT untuk mengetahui kemampuan ruas jalan desa yang dilalui oleh masyarakat memang sangat berguna manfaatnya dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki oleh desa. Hasil nilai analisis SWOT dapat diketahui dengan posisi matriks internal eksternal pada Tabel 2 tentang posisi ruas jalan desa pada kuadran berapa nilainya.

Tabel 2. Nilai Hasil Analisis Matriks IE

No	Posisi Matriks IE	Ruas Jalan
1	I	23
2	II	32
3	III	-
4	IV	4
5	V	53
6	VI	9
7	VII	-
8	VIII	8
9	IX	1

Berdasarkan hasil dari posisi nilai matrik Internal Eksternal dapat diketahui ruas jalan desa mana yang masuk atau tidak masuk dalam pengelolaan pemeliharaan jalan desa. Ada 115 ruas jalan desa yang masuk kategori penanganan pemeliharaan jalan desa karena potensi yang dimiliki oleh desa dapat lebih bermanfaat untuk prioritas pengembangan desa sedangkan 15 ruas jalan desa belum masuk dalam penilaian prasarana jalan desa sehingga perlu adanya pemerintah daerah mengembangkan potensi yang ada didesa tersebut. Dari 115 ruas jalan desa yang masuk penanganan pengelolaan pemeliharaan jalan desa semua termasuk kategori pemeliharaan berkala.

Analisis urutan pengelolaan jalan desa dilakukan untuk mengetahui urutan jalan desa dalam pemeliharaannya. Dalam analisis ini menggunakan metode analisis MDm dimana hasilnya adalah nilai yang paling diinginkan oleh masyarakat dengan menggunakan lima faktor kriteria penilaian. Hasilnya dapat dilihat dari Tabel 3 tentang hasil analisis MDm.

No	Nilai MDm (%)	Ruas Jalan
1	100	2
2	93	4
3	87	3
4	80	6
5	73	7
6	67	10
7	60	8
8	53	31
9	47	19
10	40	15
11	33	9

Tabel 3. Hasil Nilai Analisis MDm

Nilai MDm yang hasilnya paling tinggi mendapatkan urutan yang paling didahulukan dalam pengelolaan pemeliharaan jalan desa kemudian urutan dibawahnya menyusul sampai ke nilai yang terendah. Sedangkan untuk nilai yang sama urutan prioritas didahulukan berdasarkan hasil nilai tinggi susunan dari urutan lima faktor penilaian MDm.

Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara dan menyusun anggaran pembiayaan pemeliharaan ruas jalan desa. Penyusunan rencana anggaran biaya merupakan menghitung berapa material, upah pekerja dan peralatan yang digunakan. Setelah menyusun rencana anggaran biaya adalah menyusun anggaran yang dikeluarkan untuk mengerjakan proyek pemeliharaan jalan desa dengan hasil rencana anggaran biaya ditambah dengan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi dan evaluasi analisis kriteria penilaian yang telah tersusun maka dapat diketahui membuat rencana strategi pengelolaan pemeliharaan jalan desa di Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Tersusun data inventaris jalan desa yang didapat dari hasil survei data desa sebanyak 154 ruas jalan desa.
 - b. Tersusunnya daftar data inventaris jalan desa yang masuk kategori pemeliharaan jalan yang berdasarkan hasil dari analisis kriteria penilaian prasarana sebanyak 115 ruas jalan desa.
 - c. Tersusunnya data pengelolaan pemeliharaan ruas jalan desa dengan anggaran Rp 1.110.000.000 pertahun hanya mampu memelihara sekitar 36 ruas jalan dari 115 ruas jalan desa yang terdaftar masuk kategori pemeliharaan.

2. Hasil dari analisis *Most Desirable* oleh Masyarakat (MDm) dan analisis biaya pemeliharaan jalan desa dilakukan untuk bagaimana menentukan urutan penanganan pemeliharaan jalan desa di Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan urutan penanganan pemeliharaan jalan desa yang sebanyak 115 ruas jalan dilakukan berdasarkan hasil dari analisis MDm sehingga didapat urutan prioritas. Prioritas yang didahulukan adalah ruas jalan yang mendapat nilai MDm tertinggi persennya kemudian disusul nilai persen dibawahnya.
 - b. Karena anggaran pemeliharaan jalan desa di Kabupaten Barito Utara terbatas maka disusunlah urutan prioritas penanganan pemeliharaan berdasarkan hasil analisis biaya, dalam tahun 2014 hanya 36 ruas jalan desa prioritas penanganan pemeliharaan dari 115 ruas jalan desa. Karena anggaran untuk 115 ruas jalan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 3.532.482.275 sedangkan sumber dana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2014 sebesar Rp 1.110.000.000.
3. Penyusunan strategi pemeliharaan jalan desa dapat dilakukan dengan menyusun rencana strategi jangka panjang dan rencana strategi jangka pendek sebagai berikut:
 - a. Dalam rencana jangka panjang, lima tahun program kerja jumlah paket pekerjaan yang ditangani oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara sebanyak 115 paket dengan rencana anggaran biaya Rp 3.532.482.275.
 - b. Dalam rencana jangka pendek tiap satu tahun program kerja untuk tahun pertama 36 paket dengan alokasi dana Rp 1.110.000.000, untuk tahun kedua 35 paket dengan alokasi dana Rp 1.137.200.000, untuk tahun ketiga 39 paket dengan alokasi dana Rp 1.165.650.000 sedangkan sisa paket pekerjaan ada 5 paket pekerjaan dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 168.199.850 untuk dikerjakan pada tahun keempat.

Semua paket pekerjaan pemeliharaan jalan desa dapat ditangani dengan asumsi setiap tahun yang telah dialokasikan dengan rencana anggaran biaya yang telah direncanakan dapat diselesaikan dalam program kerja 4 tahun.

DAFTAR RUJUKAN

- Bappeda. 2003. *Manual Teknis Tingkat Kecamatan dan Desa*. Barito Utara, Bidang Penguatan Kelembagaan untuk Pengembangan Prasarana Perdesaan.
- Bappenas. 2001. *Konsep Strategi dan Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Perdesaan*. Jakarta: Sekretariat perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Prasarana perdesaan.
- David, Fred R. 2011. *Konsep Manajemen Strategi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dwi Harjono, C. Aref. 2004. *Arahan Peningkatan Pengelolaan Jalan Kota di Kota Semarang*. Tesis: Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haral dan Faiz. 1988. *Road Deterioration in Developing Countries*. World Bank. Washington DC.
- Hudson, W.R., and Has, R. 1997. *Infras structure Management*. McG raw-Hill, New York.
- Hungers, J.D., & Wheelen, T.L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi offset.
- Johannessen, B. 1998. *Pedoman Teknis Metode Pembangunan Jalan berbasis Tenaga Kerja*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Perdesaan
- Parikesit, Danang, Agus Taufik Mulyono dan Ibnu Busono. 2002. *Mekanisme Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pemeliharaan Jalan sebagai Antisipasi Road Fund*. Palangka Raya: Makalah disampaikan dalam Konferensi Regional Teknik Jalan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Tentang Jalan.
- Peterson, W.D.O. 1987. *Road Deterioration and Maintenance Effects, Model for Planning and Management*. International Standard Model for HDM III, Transportation Department. The World bank, Washington, D.C.
- Robinson R,U Danielson & M Snaith, 1998. *Road Maintenance Management : Concept and System*. Macmillan Press Ltd.
- Salusu, J 1998. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta, Penerbit Gramedia.
- Siregar D, Doli. 2002. *Manajemen Aset*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suraji A. 2004. *Strategi Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan*. Palangka Raya: Makalah disampaikan dalam Konferensi Regional Pengembangan Percepatan Perdesaan.
- Tamin, Ofyar Zdan Muhammad Isnaeni. 2002. *Pengembangan Model Alokasi Pendanaan Jalan Propinsi yang Sesuai di Era Otonomi Daerah*. Palangka Raya: Makalah disampaikan dalam Konferensi Regional Teknik Jalan.
- Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Tentang Jalan.
- Watson, J.1989. *Highway Construction and Maintenance*. 2nd edition, England Longman Scientific & Technical.